
RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024



RENJA 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SubhanaWata'ala, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman kepada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya renja ini. Masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan renja ini sehingga diharapkan saran dalam rangka perbaikan dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sungguminasa, Desember 2022
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GOWA,**

MAPPASOMBA, SE.,MM

NIP. 19640715 198803 1 021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa atau disebut Renja adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2024 yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Berdasarkan Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu Satu tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan Rencana Kerja OPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra OPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja OPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja OPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024

sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan.

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan.
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
-

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026.
15. Nomor 57 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, sertatata kerja badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten gowa
16. Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2024 adalah sebagai dokumen

perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dalam pencapaian program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Gowa yang memuat arah kebijakan pelayanan yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk peningkatan kinerja pelayanan Pelayanan di bidang kesatuan bangsa, dan politik Kabupaten Gowa pada umumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024
 2. Menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2024;
 3. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024;
-

-
4. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
 5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB I PENDAHULUAN ; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ; Bab ini menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ; Bab ini menyajikan Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GOWA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Tabel evaluasi pelaksanaan renja terlampir :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

Dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa menggunakan Indikator yang telah dikembangkan secara mandiri, berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa. Capaian kinerja pelayanan disajikan pada tabel T-C 30 Sebagaimana terlampir dalam rencana kerja ini.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, maka sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan.
2. Terciptanya ketentraman antarSuku, Agama, Ras, dan golongan.

Sasaran di atas disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, sertatata kerja badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten gowa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politikserta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah
-

kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik ;
 - d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri dan penanganan konflik;
 - f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan ketahanan ekonomi;
 - g. membina dan mengarahkan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - i. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan dan peralatan badan;
-

-
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas badan;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - l. menilai prestasi kerja Sekretaris dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepegawaian dan diklat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
-

2.3. Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Dalam hal tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa mengenai koordinasi dan sinergi program antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ditjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri yang ada sangat mendukung Visi misi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih sehingga hal-hal yang akan menghambat dalam pencapaian renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa tidak akan bermasalah jika tidak terjadi *force mayore* atau kejadian luar biasa sehingga sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan oleh Daerah maupun Nasional akan bersinergi sesuai apa yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Sejauh ini permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa yaitu :

1. Meluasnya penyebaran paham-paham keagamaan yang menyimpang
2. Kondisi geografis menyebabkan minimnya jangkauan pemberdayaan masyarakat
3. Tidak terbentuknya jejaring penanganan konflik sosial di masyarakat
4. Belum tersedianya sistem informasi potensi konflik sosial
5. Sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum optimal dalam pencapaian kinerja
6. Data dan informasi belum terintegrasi dari masing-masing instansi terkait

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dalam membuat rencana kerja didasarkan pada RKPD Kabupaten Gowa. Dalam proses tersebut ada catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang

tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda ini diakibatkan adanya beberapa penambahan kegiatan yang dananya bersumber pada Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN . Dan tidak semua program yang telah direncanakan dalam RKPD dapat terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (*topdown-bottom up*).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan kesatuan bangsa dan politik Tahun 2021 - 2026 diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif dan efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, terdapat beberapa usulan masyarakat terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa. Usulan tersebut sebagai berikut :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah:..... Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
1	Usulan Masyarakat dari Musrenbang Desa/Kel	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				
2	Usulan Masyarakat Hibah	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				
3	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				
4	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				
5	Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, pemerintah menetapkan salah satu agenda pembangunan yakni memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan salah satu isu strategis meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak.

Adapun arah kebijakan dan strategi pemerintah menjaga stabilitas keamanan khususnya penguatan keamanan dalam negeri adalah 1) Peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme; (2) Pengamanan obyek vital dan target rentan; (3) Penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar; (4) Penyelamatan di wilayah rawan dan bencana; dan (5) Penanganan konflik secara humanis.

3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan provinsi merupakan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa. Berdasarkan Rencana Pembangunan provinsi tahun 2018-2023,

3.3. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3.1. Tujuan

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa berdasarkan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan
-

2. Menciptakan keamanan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan

3.3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa adalah :

1. Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam pemberdayaan masyarakat
2. Terciptanya ketentaraman antarSuku, Agama, Ras, dan golongan

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI	CAPAIAN
				2022	2023	2024	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	persen	20%	20%	20%	0	0

3.4. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah;

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
- b. Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
- c. Pencapaian SDG's

Jumlah program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sebanyak 6 Program, 12 Kegiatan, dan 33 sub kegiatan. Terdapat satu program yang tersebar dilaksanakan di wilayah kecamatan di Kabupaten Gowa. Sementara 5 (lima) program lainnya dilaksanakan di wilayah kecamatan somba opu.

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025 disajikan pada lampiran I (Tabel T-C.33) Penyajian Program dan kegiatan disajikan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerjasama Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Sungguminasa, Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Gowa

Mappasomba, Se.,MM
Nip.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01	PEMERINTAHAN UMUM			(kosongkan)						
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	Tujuan : 1. Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan 2. Menciptakan keamanan keamanan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan									
	Sasaran : 1. Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan 2. Menciptakan keamanan keamanan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15	3	3	100%	3	6	40%

		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5		1	1	100%	1	2	40%
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	85		17	17	100%	17	34	40%
		01	2.02	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	95		19	19	100%	19	38	40%
		01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100%					100%		
		01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket dinas beserta atribut kelengkapannya	100	tidak dianggarkan tahun 2022				20	20	
		01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25					5	5	
		01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan layanan umum perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15		3	3	100%	3	6	40%
		01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan disediakan	15		3	3	100%	3	6	40%
		01	2.06	06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5		1	1	100%	1	2	40%
		01	2.06	08	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60		4	4	100%	4	8	13,33%
		01	2.06	09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60		12	12	100%	12	24	40%
		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		01	2.07	06	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12		2	2	100%	4	6	50%
		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		01	2.08	04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60		12	12	100%	12	24	40%

		03	2.01	03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150	Tidak dianggarkan di tahun 2022 namunsub kegiatan masuk dalam Renja 2022								
		03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150		30	30	100%	30	60	40%		
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	100%		20%	20%	100%	20%	40%	40%		
		04	2.01		perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang difasilitasi pendaftarannya	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%		
		04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	350		24	24	100%	24	48	13,71%		
		04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Tidak dianggarkan di tahun 2022 namunsub kegiatan masuk dalam Renja 2022								
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		05	2.01		perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang dikoordinasikan	100%		100%	100%		100%	100%	100%		

		05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragamaan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragamaan dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250	Tidak dianggarkan di tahun 2022 namun sub kegiatan masuk dalam Renja 2022								
		05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250		50	50	100%	50	100	40%		
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik antargolongan yang ditindaklanjuti	100%		100%			100%				
		06	2.01		perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik antargolongan yang dikoordinasikan	100%		100%			100%				
		06	2.01	03	pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	150	Tidak dianggarkan di tahun 2022 namun kegiatan masuk dalam Renstra dan sub kegiatan masuk dalam Renja 2022								
		06	2.01	04	pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	150	idem								

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gowa

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023 (target)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan</i>			20%	20%	20%	20%	20%	0	20%	20%	20%	

Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<i>berdasarkan rincian belanja</i>					<i>berdasarkan rincian belanja</i>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.988.450.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.988.450.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gowa, somba opu, sungguminasa	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	25.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gowa, somba opu, sungguminasa	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	25.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	20.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100%	1.520.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100%	1.520.000.000	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	semua kab/kota, semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	1.500.000.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	semua kab/kota, semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	1.500.000.000	

	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	19	20.000.000	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	19	20.000.000	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100%	21.250.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100%	21.250.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah paket paket dinas beserta atribut kelengkapannya	20	11.250.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah paket paket dinas beserta atribut kelengkapannya	20	11.250.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	10.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	10.000.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase ketersediaan layanan umum perangkat daerah	100%	256.200.000	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase ketersediaan layanan umum perangkat daerah	100%	256.200.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	2.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	2.200.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	15.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	15.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	semua kab/kota, semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan disediakan	3	7.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	semua kab/kota, semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan disediakan	3	7.000.000	
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	1.200.000	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	1.200.000	

	Penyediaan bahan/material	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah bahan paket/material yang disediakan	1	10.000.000	Penyediaan bahan/material	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah bahan paket/material yang disediakan	1	10.000.000	
	fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	3.000.000	fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	3.000.000	
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	semua kab/kota, semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	220.000.000	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	semua kab/kota, semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	220.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	40.000.000	
	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	40.000.000	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	80.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	80.000.000	
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	80.000.000	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	80.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	46.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	46.000.000	
	penyediaan jasa pemeliharaan biaya, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	1	36.000.000	penyediaan jasa pemeliharaan biaya, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	1	36.000.000	
	pemeliharaan mebel	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah mebel yang dipelihara	1	5.000.000	pemeliharaan mebel	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah mebel yang dipelihara	1	5.000.000	

	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	5.000.000	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	5.000.000	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Gowa, Somba Opu, Sungguminasa	Persentase potensi konflik etnis yang ditindaklanjuti	100%	411.726.700	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Gowa, Somba Opu, Sungguminasa	Persentase potensi konflik etnis yang ditindaklanjuti	100%	771.726.700	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	Persentase potensi konflik etnis yang dikoordinasikan	100%	411.726.700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	Persentase potensi konflik etnis yang dikoordinasikan	100%	771.726.700	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20	40.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1	400.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gowa, Sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40	371.726.700	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gowa, Sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40	371.726.700	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gowa, Sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	10.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gowa, Sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	10.000.000	

	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5	50.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5	55.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	Persentase permohonan bantuan keuangan partai politik yang memenuhi syarat	100%	2.600.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	Persentase permohonan bantuan keuangan partai politik yang memenuhi syarat	100%	2.502.002.000	
	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	Jumlah permohonan bantuan keuangan yang diverifikasi	100%	2.600.000.000	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	Jumlah permohonan bantuan keuangan yang diverifikasi	100%	2.502.002.000	

	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		100.000.000	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		100.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80	2.500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80	2.402.002.000	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	10.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	10.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	20%	100.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	100%	33.330.000	

	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase ormas yang difasilitasi pendaftarannya	100%	100.000.000	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase ormas yang difasilitasi pendaftarannya	100%	33.330.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	80.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	11.330.000	
	Pelaksanaan Koordiinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordiinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35	20.000.000	Pelaksanaan Koordiinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordiinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35	22.000.000	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	10.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	10.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang ditindaklanjuti	100%	110.000.060	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang ditindaklanjuti	100%	180.400.060	

	perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang dikoordinasikan	100%	110.000.060	perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang dikoordinasikan	100%	180.400.060	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragamaan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10	50.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragamaan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10	50.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	60.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	130.400.000	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	10.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	10.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik antargolongan yang ditindaklanjuti	100%	137.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik antargolongan yang ditindaklanjuti	100%	137.000.000	

	perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase potensi konflik antargolongan yang dikoordinasikan	100%	137.000.000	perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Persentase potensi konflik antargolongan yang dikoordinasikan	100%	137.000.000	
	pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	20	100.000.000	pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	20	100.000.000	
	pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	50	27.000.000	pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	50	27.000.000	

	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Kab. Gowa, somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	10	10.000.000	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Kab. Gowa, somba opu, sungguminasa	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	10	10.000.000	
--	--	--	---	----	------------	--	--	---	----	------------	--

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	PEMERINTAHAN UMUM				<i>berdasarkan rincian belanja</i>				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	1.988.450.000	DAU		100%	1.896.775.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Gowa, somba opu, sungguminasa	100%	25.000.000	DAU		100%	27.500.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	3	20.000.000	DAU		3	22.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	1	5.000.000	DAU		1	5.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	1.520.000.000	DAU		100%	1.672.000.000
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	semua kab/kota, semua kecamatan semua kelurahan	17	1.500.000.000	DAU		17	1.650.000.000
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	19	20.000.000	DAU		19	22.000.000
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	21.250.000	DAU		100%	23.375.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket paket dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	20	11.250.000	DAU		20	12.375.000

				Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	5	10.000.000	DAU		5	11.000.000
				Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan layanan umum perangkat daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	256.200.000	DAU		100%	38.600.000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	3	2.000.000	DAU		3	2.200.000
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	3	15.000.000	DAU		3	16.500.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan disediakan	semua kab/kota, semua kecamatan semua kelurahan	3	7.000.000	DAU		3	7.700.000
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	1	1.200.000	DAU		1	1.200.000
				Penyediaan bahan/material	Jumlah bahan paket/material yang disediakan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	1	10.000.000	DAU		1	11.000.000
				fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	12	3.000.000	DAU		12	3.300.000,00
				penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	semua kab/kota, semua kecamatan semua kelurahan	12	220.000.000	DAU		12	24.200.000,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		100%	40.000.000	DAU		100%	44.000.000,00
				pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	2	40.000.000	DAU		2	44.000.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	80.000.000	DAU		100%	88.000.000
				penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	12	80.000.000	DAU		12	88.000.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	46.000.000	DAU		100%	47.000.000

				penyediaan jasa pemeliharaan biaya, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	1	36.000.000	DAU		1	36.000.000
				pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	1	5.000.000	DAU		1	5.500.000
				pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		10	5.000.000	DAU		10	5.500.000
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik etnis yang ditindaklanjuti	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	411.726.700	DAU		100%	518.899.370
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik etnis yang dikoordinasikan	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	100%	411.726.700	DAU		100%	518.899.370
				Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka TunggalIka dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	20	40.000.000	DAU		20	44.000.000
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yaang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab.Gowa, sungguminasa	40	371.726.700	DAU		40	408.899.370

				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab.Gowa, sungguminasa	4	10.000.000	DAU		4	11.000.000
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	5	50.000.000	DAU		5	55.000.000
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase permohonan bantuan keuangan partai politik yang memenuhi syarat	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	100%	2.600.000.000	DAU		100%	
				perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah permohonan bantuan keuangan yang diverifikasi	Kab. Gowa, Bontomarannu, Pakkatto	100%	2.600.000.000	DAU		100%	

				Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa		100.000.000	DAU			110.000.000
				Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	80	2.500.000.000	DAU		80	2.500.000.000
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	4	10.000.000	DAU		4	11.000.000

				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan		20%	100.000.000	DAU		20%	121.000.000
				perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang difasilitasi pendaftarannya	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	100.000.000	DAU		100%	121.000.000
				Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100	80.000.000	DAU		100	88.000.000
				Pelaksanaan Koordiinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordiinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	35	20.000.000	DAU		35	22.000.000
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	4	10.000.000	DAU		4	11.000.000
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang ditindaklanjuti	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	110.000.060	DAU		100%	132.000.000
				perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang dikoordinasikan	Kab. Gowa,somba opu, sungguminasa	100%	110.000.060	DAU		100%	132.000.000

				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gowa, somba opu, sungguminasa	10	50.000.000	DAU		10	55.000.000
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gowa, somba opu, sungguminasa	50	60.000.000			50	66.000.000
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gowa, somba opu, sungguminasa	4	10.000.000			4	11.000.000
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik antargolongan yang ditindaklanjuti		100%	137.000.000			100%	151.000.000

